

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (UU PLH), pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang. Berdasarkan pengertian tersebut, maka *sustainable development* bertujuan untuk mengintegrasikan masalah di antara dimensi pembangunan, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dua konsep utama dari *sustainable development* ini ialah kebutuhan dan keterbatasan (Totok Mardikanto, 2014:14-15).

Adapun ciri-ciri pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang (Totok Mardikanto, 2014:17):

1. Menjamin pemerataan dan keadilan, yaitu generasi mendatang memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam sehingga berkelanjutan.
2. Menghargai dan melestarikan keanekaragaman hayati, spesies, habitat, dan ekosistem agar tercipta keseimbangan lingkungan.
3. Menggunakan pendekatan integratif sehingga terjadi keterkaitan yang kompleks antara manusia dengan lingkungan untuk masa kini dan mendatang.
4. Menggunakan pandangan jangka panjang untuk merencanakan rancangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang mendukung pembangunan.
5. Meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
6. Memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang dan mengaitkan bahwa pembangunan ekonomi harus seimbang dengan konservasi lingkungan.

2.1.2. Sustainability Report

Sustainability Reporting adalah pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur, mengungkapkan (*disclose*) kinerja perusahaan pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta upaya perusahaan untuk menjadi perusahaan yang akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk tujuan kinerja perusahaan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Secara singkat, *sustainability reporting* dapat diartikan sebagai laporan mengenai *triple bottom line* dan pertanggungjawaban perusahaan. Adanya *sustainability reporting* membantu perusahaan untuk mengukur, memahami dan mengkomunikasikan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial dan politiknya yang kemudian dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menentukan arah/tujuan perusahaan dan membantu mengatur perubahan secara efektif. Laporan keberlanjutan merupakan kunci utama bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan kinerja keberlanjutan dan pengaruhnya baik secara positif maupun negatif (www.globalreporting.org).

Di Indonesia, perusahaan yang telah *go public* memiliki kewajiban membuat laporan keberlanjutan sesuai dengan amanat Pasal 66 Ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) telah mengeluarkan aturan yang mengharuskan perusahaan publik untuk mengungkapkan pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di dalam laporan tahunannya. Melalui penerapan *sustainability reporting* diharapkan perusahaan dapat berkembang secara berkelanjutan (*sustainable growth*) yang didasarkan atas etika bisnis (*business ethics*). *Sustainability reporting* dapat menginformasikan segala bentuk kegiatan perusahaan melalui pos-pos pembiayaan perusahaan guna lingkungan sosialnya yang berbeda seperti pengungkapan pada laporan keuangan biasanya.

Global Reporting Initiative (GRI) yang berkedudukan di Belanda sebagai suatu standar organisasi internasional yang membantu perusahaan, pemerintahan, dan perusahaan lainnya untuk memahami dan mengkomunikasikan pengaruh mereka terhadap isu-isu seperti perubahan iklim, hak azasi dan korupsi telah mengeluarkan panduan/pedoman yang dapat digunakan untuk mengukur praktik *sustainability management* berupa *GRI Sustainability Reporting Guidelines* dengan menunjukkan beberapa elemen penting yang berhubungan dengan 3 aspek yaitu ekonomi,

lingkungan dan manusia atau *triple bottom line (Profit, Planet & People)*. Konsep *triple bottom line* dipopulerkan oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya *Cannibals With Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*. Elkington memberi pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan 3P (*profit, people, and planet*). Selain mengejar *profit*, perusahaan juga harus memperhatikan dan melibatkan diri pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) serta turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Dalam gagasan tersebut, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi finansialnya saja, namun juga harus memerhatikan aspek sosial dan lingkungannya.

2.1.3. Indonesia Sustainability Reporting Awards (ISRA)

Indonesia Sustainability Reporting Awards (ISRA) adalah penghargaan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang telah membuat pelaporan atas kegiatan yang menyangkut aspek lingkungan dan sosial disamping aspek ekonomi untuk memelihara keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan itu sendiri. ISRA merupakan penghargaan terhadap perusahaan-perusahaan yang telah menyelenggarakan laporan keberlanjutan (*sustainability report*), baik yang diterbitkan secara terpisah maupun terintegrasi dalam laporan tahunan (*annual report*) (sra.ncsr-id.org).

Tujuan diadakannya *Indonesia Sustainability Reporting Awards (ISRA)* adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengakuan kepada perusahaan-perusahaan yang melaporkan dan mengumumkan informasi mengenai kinerja lingkungan, sosial, atau informasi keberlanjutan.
2. Mendorong pelaksanaan pelaporan lingkungan, sosial, dan keberlanjutan.
3. Meningkatkan akuntabilitas perusahaan dan menekankan tanggung jawabnya terhadap pemangku kepentingan utama (*key stakeholders*).
4. Meningkatkan kesadaran terhadap transparansi perusahaan dan pengungkapan isu-isu material.

ISRA dapat diikuti oleh baik itu perusahaan publik, perusahaan milik pemerintah, maupun perusahaan yang masih *private* dengan syarat bahwa perusahaan tersebut harus telah mempublikasikan *sustainability report*, dan/atau telah membuat laporan CSR di dalam *annual report* perusahaan (laporan terintegrasi). Kategori penghargaan ISRA terdiri dari : *Best Sustainability Report*, *Best CSR Disclosure in the Annual Report*, *Best Website on Sustainability Communication*, *Commendation for First Time Sustainability Report (all first time reporters)*, dan lain sebagainya yang dapat berubah tiap tahunnya sesuai dengan perkembangannya.

Adapun 3 (tiga) kriteria penilaian dalam acara penghargaan ISRA antara lain:

1. Kelengkapan (*completeness*), meliputi: profil perusahaan, dampak penting, kebijakan sosial/lingkungan, komitmen manajemen, target dan tujuan kebijakan sosial/lingkungan, layanan produk dan jasa, kebijakan pengadaan bahan baku dan isu-isu yang terkait dengannya, kebijakan pelaporan dan pembukuan, dan hubungan antara pelaporan sosial/lingkungan dengan masalah pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability development*), sistem manajemen (*management system*) serta tata kelola perusahaan (*corporate governance*).
2. Kepercayaan (*credibility*), meliputi: pencapaian utama saat ini, penyebutan anggota tim yang bertanggung jawab untuk isu sosial/ekonomi, sistem manajemen dan integrasinya ke kegiatan usaha, perencanaan ketidakpastian dan manajemen risiko, proses audit internal, ketaatan (*compliance*) atau ketidaktaatan terhadap peraturan, data-data mengenai dampak sosial/ekonomi, data-data keuangan konvensional yang berhubungan, laporan keuangan sosial/lingkungan dan *full cost accounting*, akreditasi atau sertifikasi ISO, penjabaran mengenai interaksi dengan pihak terkait atau proses dialog, pemanfaatan masukan dari pihak-pihak yang terkait, serta pernyataan dari pihak ketiga.
3. Komunikasi (*communication*), meliputi: tata letak dan penampilan, kemudahan dipahami, dibaca dan proporsional uraian tiap bagian, mekanisme komunikasi dan umpan balik (*feedback*), ringkasan pelaporan (*executive summary*), tersedia petunjuk kemudahan untuk membaca laporan, pemanfaatan sarana intranet &

internet, acuan bagi *website* dan pelaporan lain, dan hubungan antar pelaporan, kesesuaian grafik, gambar dan foto dengan narasi, dan integrasi dengan laporan keuangan (*financial statement*).

2.1.4. Teori Stakeholders

Teori *Stakeholder* pertama kali dipopulerkan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984 dalam buku Manajemen Strategisnya: Pendekatan *Stakeholder* (1984). Freeman mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai “kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi.” Adapun tujuan dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu korporasi memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal untuk mengembangkan keunggulan kompetitif (Totok Mardikanto, 2014:68). Teori *stakeholder* menyatakan bahwa dalam proses pengambilan keputusan perusahaan harus mempertimbangkan semua *stakeholder* dengan alasan bahwa hal ini adalah cara yang benar untuk bertindak secara moral dan etis, melaksanakan hal ini sebenarnya juga menguntungkan pemegang saham, dan hal ini merefleksikan apa yang sebenarnya terjadi di dalam perusahaan (David Crowther & Shahla Seifi, 2011:37).

Untuk menunjukkan kepada para *stakeholder* bahwa perusahaan telah mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan para *stakeholder* dapat diinformasikan melalui *sustainability report* di mana bukan hanya *people* dan *profit* saja yang diutamakan, tetapi lingkungan juga termasuk sebagai anggota *stakeholder* yang dipertimbangkan.

2.1.5. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency theory memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agen para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya (*self-interest*) bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham atau dengan kata lain, manajemen tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya dan para pemegang saham khususnya. Menurut konsep ini, pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Upaya ini

menimbulkan apa yang disebut *agency cost* yang mencakup biaya untuk pengawasan oleh pemegang saham; biaya yang dikeluarkan oleh manajemen untuk menghasilkan laporan yang transparan, termasuk biaya audit yang independen serta biaya yang disebabkan karena menurunnya nilai kepemilikan pemegang saham karena adanya pemberian opsi dan berbagai manfaat yang diberikan kepada manajemen oleh pemegang saham dengan tujuan menyelaraskan kepentingan pemegang saham dengan manajemen. *Agency theory* muncul berdasarkan adanya fenomena pemisahan antara pemilik perusahaan (pemegang saham/*owner*) dengan para manajer yang mengelola perusahaan. Fakta-fakta empiris menunjukkan bahwa para manajer tidak selamanya bertindak sesuai dengan kepentingan para pemilik perusahaan, melainkan sering kali terjadi bahwa para pengelola perusahaan (direksi dan manajer) bertindak mengejar kepentingan mereka sendiri (Ismail Solihin, 2009:119-120).

2.1.6. Profitabilitas

Analisis profitabilitas sering digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang: kemampuan memperoleh laba bruto, cara manajemen mendanai investasinya, dan pertanyaan tentang kecukupan pendapatan yang dapat diterima pemegang saham biasa dari investasi yang mereka lakukan dalam pemilikan perusahaan (L.M. Samryn, 2015:372).

Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya bahwa penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Adapun jenis-jenis rasio profitabilitas sebagai berikut: *Profit Margin*, *Return on Investment (ROI)*, *Return on Equity (ROE)*, Laba Per Lembar Saham, Rasio Pertumbuhan (Kasmir, 2010:115).

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Return on Equity (ROE)*. *Return on Equity (ROE)* merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri (Kasmir, 2010:115). Dengan membandingkan persentase ROE periode berjalan dengan periode-periode sebelumnya akan mengungkapkan kecenderungan,

dan dengan membandingkannya terhadap gabungan industri mengungkapkan apakah perusahaan mampu bertahan dengan baik menghadapi saingannya (Ardiyos, 2008:803).

Semakin tinggi hasil pengembalian atas ekuitas berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas ekuitas berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas (Hery, 2015:230).

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Equity}} \times 100\%$$

(Kasmir, 2010:137)

2.1.7. Ukuran Perusahaan

Secara umum, bisnis dapat dikelompokkan ke dalam 4 grup sosial termasuk di dalamnya kelompok elit super kaya. Dua dari tiga kelompok lainnya diidentifikasi oleh Lynch-Wood et al. sebagai perusahaan besar, dan kecil serta menengah. Menurutnya, perusahaan yang muncul pertama kali akan lebih menarik perhatian media dan perusahaan tersebut diwajibkan untuk mengadopsi *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sedangkan perusahaan yang baru-baru muncul dianggap masih terlalu kecil untuk menarik perhatian media sehingga belum perlu menerapkan CSR. Kelompok yang keempat adalah perusahaan yang sangat kecil dan pekerja – pekerja mandiri yang bergantung terhadap rekomendasi pelanggan kepada relasi-relasinya untuk kelangsungan aktivitas masa depannya. Lynch-Wood et al. menyimpulkan bahwa *self-regulation* untuk CSR tidak bekerja pada perusahaan yang sangat kecil karena tuntutan sosial untuk tanggung jawab sosialnya paling lemah. Aktivitas dari perusahaan yang besar akan lebih terlihat dan lebih mungkin untuk mengidentifikasi minat media sehingga pengungkapan CSR secara sukarela lebih berfungsi pada perusahaan tersebut (Peter Challis dan Laura Challis, 2014:108).

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan, dan rata-rata total aktiva. Sedangkan ukuran perusahaan dapat juga diartikan sebagai rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam

hal ini penjualan lebih besar daripada variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak (Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston, 2001:17-119).

Ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal, menentukan kekuatan tawar-menawar (*bargaining power*) dalam kontrak keuangan, kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan *return* membuat perusahaan yang lebih besar dapat memperoleh lebih banyak laba. Ukuran perusahaan dapat ditentukan berdasarkan laba, aktiva, tenaga kerja, dan lain-lain (Agnes Sawir, 2004:101-102). Perusahaan dengan ukuran yang besar cenderung menerbitkan *sustainability report* yang akan mengungkapkan tanggung jawab perusahaan terhadap aktivitas yang dilakukannya karena perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh publik dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur dengan total aset. Total aset sering dipakai dalam penelitian karena total aset mempunyai nilai yang sangat besar dibandingkan dengan variabel lain (Asnawi dan Wijaya, 2005:274).

$$Size = Total Asset$$

(Asnawi dan Wijaya, 2005:274)

2.1.8. Leverage

Rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). Adapun jenis-jenis rasio *leverage* antara lain : *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)*, *Debt to Equity Ratio*, *Long Term Debt to Equity ratio*, *Time Interest Earned*, *Fixed Charge Coverage* (Kasmir, 2010:112).

Penggunaan hutang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (hutang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat hutang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban hutang tersebut. Karena itu sebaiknya perusahaan harus

menyeimbangkan berapa hutang yang layak diambil dan dari mana sumber-sumber yang dapat dipakai untuk membayar hutang (Irham Fahmi, 2014: 158).

Para kreditor jangka panjang lebih berkepentingan pada rasio *leverage* karena dengan ini para kreditor dapat mengetahui :

1. Keberhasilan perusahaan membelanjai aktivitya. Masalah pertama dapat diketahui dengan menggunakan rasio *leverage* neraca, dan yang kedua dapat diketahui dengan menggunakan rasio-rasio yang didasarkan pada laporan laba-rugi, atau sering disebut *coverage ratio*.
2. Kemampuan perusahaan menghasilkan laba untuk menutupi beban tetap yang berhubungan dengan penggunaan dana-dana yang berasal dari bukan pemilik, termasuk penggunaan dana untuk melunasi bunga obligasi dan pembayaran kembali pokok pinjaman.

Leverage dalam penelitian ini diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio*. *Debt to Equity Ratio*, merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Untuk mencari rasio ini dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain rasio ini untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang (Kasmir, 2010:112).

Perusahaan dengan rasio hutang yang semakin kecil menunjukkan bahwa perusahaan tersebut lebih sehat walaupun tidak semua hutang itu berbahaya. Hutang yang berbahaya adalah hutang yang mengharuskan membayar beban bunga lebih besar daripada manfaat yang diperoleh dari hutang tersebut. Rasio hutang terhadap modal bersifat semakin kecil semakin baik. Untuk keamanan pihak luar, rasio terbaik jika jumlah modal lebih besar dari jumlah utang atau minimal sama. Namun bagi pihak pemegang saham atau manajemen, rasio *leverage* ini sebaiknya besar.

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

(Kasmir, 2010:124).

2.1.9. Corporate Governance

Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Secara singkat, GCG dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena GCG dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang Bersih, Transparan, dan Profesional (BTP) (M. Arief Effendi, 2009:2).

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) telah mengembangkan *The OECD Principles of Corporate Governance* pada bulan April 1998 yang mencakup 5 hal sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (*the rights of shareholders*).
2. Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham (*the equitable treatment of shareholders*).
3. Peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan (*the role of stakeholders*).
4. Pengungkapan dan transparansi (*disclosure and transparency*).
5. Tanggung jawab dewan komisaris atau direksi (*the responsibilities of the board*).

Prinsip-prinsip GCG sesuai dengan Pasal 3 Surat Keputusan Menteri BUMN No.117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan GCG pada BUMN sebagai berikut :

1. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan.
2. Pengungkapan (*disclosure*), yaitu penyajian informasi kepada para pemangku kepentingan, baik diminta maupun tidak diminta, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kinerja operasional, keuangan, dan risiko usaha perusahaan.
3. Kemandirian (*independence*), yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari

pihak maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

4. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis.
5. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
6. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Munculnya suatu *sustainability report* tidak terlepas dari adanya *good corporate governance* sebagai titik awal munculnya sebuah sistem baru yang memfokuskan orientasi perusahaan pada tanggung jawab sosial.

2.1.10. Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan (Ikatan Komite Audit Indonesia, 2006:4).

Pada umumnya, komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu (Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2008:147-148):

1. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*)

Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang.

2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika,

melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

3. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*)

Komite audit bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

Kebutuhan akan komite audit disebabkan oleh belum memadainya peran pengawasan dan akuntabilitas dewan komisaris perusahaan. Pemilihan anggota dewan komisaris yang berdasarkan kedudukan dan kekerabatan menyebabkan mekanisme *check and balance* terhadap direksi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi audit internal dan eksternal belum berjalan optimal mengingat secara struktural, auditor tersebut berada pada posisi yang sulit untuk bersikap independen dan objektif. Oleh karena itu, muncul tuntutan adanya auditor independen. Komite audit timbul memenuhi tuntutan tersebut (Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2008:147-148).

Komite audit hendaknya dapat melakukan komunikasi secara efektif dengan komisaris, direksi, maupun auditor internal dan eksternal. Salah satu fungsi komite audit adalah menjembatani antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan kegiatan pengendalian yang diselenggarakan oleh manajemen serta auditor internal dan eksternal. Komite audit pada umumnya memiliki akses langsung ke setiap unsur pengendalian dalam perusahaan (M. Arief Effendi, 2009:37). Dilihat dari tanggung jawab komite audit, semakin sering komite audit suatu perusahaan melakukan komunikasi melalui pertemuan terhadap unsur pengendalian perusahaan yang lain untuk membahas tentang laporan keuangan, tata kelola perusahaan, dan pengawasan perusahaan akan mendorong perusahaan untuk memiliki mekanisme *good corporate governance* yang lebih baik sehingga kualitas laporan perusahaan yang dihasilkan pun dapat menjadi lebih baik.

2.1.11. Dewan Direksi

Dalam pedoman GCG (2006), kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan (*two board system*) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya

masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (*fiduciary responsibility*). Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dewan komisaris dan direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan.

Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota direksi termasuk direktur utama adalah setara. Tugas direktur utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan direksi. Keefektifan pengawasan dalam aktivitas perusahaan dapat dipengaruhi oleh bagaimana dewan direksi dibentuk dan diorganisir. Kinerja direksi yang baik akan mampu mewujudkan *good corporate governance* bagi perusahaan.

Fungsi pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh direksi mencakup 5 (lima) tugas utama yaitu: kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial. Dalam penerapannya, pelaksanaan GCG sangat bergantung pada fungsi-fungsi dari dewan direksi yang dipercaya sebagai pihak yang mengurus dan bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan. Semakin tinggi frekuensi rapat antara anggota dewan direksi, mengindikasikan semakin seringnya komunikasi dan koordinasi antar anggota sehingga lebih mempermudah untuk mewujudkan *good corporate governance* (Hari Suryono dan Andri Prastiwi, 2011:11).

2.1.12. Governance Committee

Komite Kebijakan *Corporate Governance* (*Governance Committee*) bertugas membantu dewan komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun oleh direksi serta menilai konsistensi penerapannya, termasuk yang bertalian dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*); Anggota Komite Kebijakan *Corporate Governance* terdiri dari anggota dewan komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi

dari luar perusahaan; Bila dipandang perlu, Komite Kebijakan *Corporate Governance* dapat digabung dengan Komite Nominasi dan Remunerasi. (KNKG, 2006:23).

Komite *Good Corporate Governance* (GCG) suatu perusahaan membantu dewan komisaris melakukan kajian kepatuhan perusahaan dan kesesuaian anggaran dasar perusahaan dengan peraturan perundangan yang berlaku, memastikan prinsip-prinsip GCG dan aspek etika telah diterapkan secara konsisten, memonitor pelaksanaan dan tindak lanjut hasil *assessment* yang dilakukan oleh *independent assessor*, memantau dan ikut serta dalam pelaksanaan sosialisasi GCG di unit bisnis, mengevaluasi, mengkaji keberadaan komite penunjang dan kualifikasi anggotanya, serta menangani pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*).

Dilihat dari tugasnya, keberadaan Komite Kebijakan *Corporate Governance* dalam perusahaan akan membantu perusahaan untuk memiliki kebijakan *corporate governance*, etika dan tanggung jawab sosial yang baik sehingga laporan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan pun akan lebih baik.

2.1.13. Independensi Auditor

Independensi merupakan dasar dari profesi auditing. Hal itu berarti bahwa auditor akan bersifat netral kepada entitas, dan oleh karena itu akan bersikap objektif. Publik dapat mempercayai fungsi audit karena auditor bersikap tidak memihak serta mengakui adanya kewajiban untuk bersikap adil (Boynton *et al.*, 2003:66). Independensi auditor adalah sikap tidak memihak kepada kepentingan siapapun dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen. Auditor mempunyai kewajiban untuk bersikap jujur tidak saja kepada pihak manajemen, tetapi juga terhadap pihak ketiga sebagai pemakai laporan keuangan, seperti kreditor, pemilik, maupun calon pemilik. Penelitian yang dilakukan oleh Prakoso (2012) menyatakan bahwa independensi auditor dipengaruhi oleh ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), lamanya hubungan audit, dan *audit fee*.

Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu KAP. Ukuran KAP dapat dikatakan besar jika KAP tersebut berafiliasi dengan *Big Four*, mempunyai cabang dan kliennya perusahaan - perusahaan besar serta mempunyai tenaga profesional di atas 25 orang.

Sedangkan ukuran KAP dikatakan kecil jika tidak berafiliasi dengan *Big Four*, tidak mempunyai kantor cabang dan kliennya perusahaan kecil serta jumlah profesionalnya kurang dari 25 orang (Arens *et al.*, 2008:33). KAP *Big Four* dianggap memiliki kualitas yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan KAP *non Big Four*. KAP *Big Four* umumnya dianggap sebagai penyedia laporan keuangan dengan kualitas audit yang lebih tinggi dan memiliki reputasi yang tinggi dalam lingkungan bisnis, sehingga akan berusaha untuk mempertahankan independensi mereka untuk menjaga nama baik. Investor cenderung lebih percaya terhadap laporan keuangan yang diaudit oleh auditor yang bereputasi. Perusahaan lebih memilih KAP *Big Four* yang dianggap lebih berkualitas dibandingkan KAP *non Big Four*.

Adapun kategori Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan *The Big Four* di Indonesia, yaitu:

1. KAP *Price Waterhouse Coopers*, yang bekerja sama dengan KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan.
2. KAP KPMG (*Klynveld Peat Marwick Goerdeler*), yang bekerja sama dengan KAP Siddharta dan Widjaja.
3. KAP *Ernst & Young*, yang bekerja sama dengan KAP Purwantono, Suherman dan Surja.
4. KAP *Deloitte Touche Tohmatsu*, yang bekerja sama dengan KAP Osman Bing Satrio.

2.1.14. Struktur Modal

Struktur modal adalah gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari hutang jangka panjang (*long-term liabilities*) dan modal sendiri (*shareholders' equity*) yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan. Kebutuhan dana untuk memperkuat struktur modal suatu perusahaan dapat bersumber dari internal dan eksternal, dengan ketentuan sumber dana yang dibutuhkan tersebut bersumber dari tempat-tempat yang dianggap aman (*safety position*) dan jika dipergunakan memiliki nilai dorong dalam memperkuat struktur modal keuangan perusahaan. Dalam artian ketika dana itu dipakai untuk memperkuat struktur modal perusahaan, maka perusahaan mampu

mengendalikan modal tersebut secara efektif dan efisien serta tepat sasaran (Irham Fahmi, 2014:79).

Struktur modal merupakan jumlah relatif dari kewajiban dan modal perusahaan untuk memperoleh gambaran dari mana perusahaan tersebut dibiayai. Pada neraca, struktur modal lazimnya terletak di sisi kanan atau bawah (Ardiyos, 2008:161). Struktur modal sangat penting bagi perusahaan karena menyangkut kebijakan penggunaan sumber dana yang paling menguntungkan (Sri Dwi Ari Ambarwati, 2010:1).

Kebijakan struktur modal melibatkan adanya suatu pertukaran antara risiko dan *return* (Sri Dwi Ari Ambarwati, 2010:2):

1. Penggunaan lebih banyak utang akan meningkatkan risiko yang ditanggung oleh para pemegang saham, misal risiko insolvabilitas, kenaikan suku bunga, dan *financial distress*.
2. Namun, penggunaan utang yang lebih besar biasanya akan menyebabkan terjadinya ekspektasi *return* atas ekuitas menjadi lebih tinggi. Misalnya adanya penghematan pajak karena bunga yang akhirnya dapat meningkatkan *Earning Per Share* dan *Return on Equity*.

Empat faktor utama yang mempengaruhi keputusan struktur modal adalah (Sri Dwi Ari Ambarwati, 2010:2):

1. Risiko bisnis, atau risiko yang inheren dengan operasi perusahaan jika perusahaan tidak mempergunakan utang. Semakin tinggi risiko bisnis perusahaan, maka semakin rendah rasio utang optimalnya.
2. Posisi perpajakan perusahaan. Salah satu alasan utama menggunakan utang adalah bunganya yang dapat menjadi pengurang pajak, yang selanjutnya akan mengurangi biaya utang efektif.
3. Fleksibilitas keuangan, atau kemampuan untuk memperoleh modal dengan persyaratan yang wajar dalam kondisi yang buruk, yang merupakan hal yang vital bagi keberhasilan jangka panjang perusahaan.
4. Konservatisme atau keagresifan manajemen. Beberapa manajer lebih agresif dari yang lainnya, sehingga beberapa perusahaan cenderung menggunakan utang sebagai usaha untuk mendorong keuntungan.

Rasio struktur modal dapat diukur dengan menggunakan *Long Term Debt to Equity Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, *Book Value Per Share*, *Number of Times Interest is Earned*, dan lain-lain (Irham Fahmi, 2014:81). Dalam penelitian ini, struktur modal diproksikan dengan menggunakan *Long Term Debt to Equity Ratio*.

Pinjaman jangka panjang (*Long Term Debt*) umumnya merupakan pinjaman kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk pembiayaan investasi perusahaan, misal untuk perluasan perusahaan yang biasa beragun aktiva perusahaan terkait atau aktiva lainnya, bahkan bisa juga beragun garansi personal dari pemegang saham perusahaan (Leny Sulistiyowati, 2010:218). Sedangkan ekuitas adalah bagian hak pemilik dalam perusahaan yang merupakan nilai sisa dari aktiva suatu perusahaan setelah dikurangi dengan kewajibannya. Ekuitas sering juga disebut sebagai nilai kekayaan bersih perusahaan atau nilai buku aktiva suatu perusahaan (Leny Sulistiyowati, 2010:229).

Long Term Debt to Equity Ratio (LDER), merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan (Kasmir, 2010:112).

Semakin tinggi tingkat rasio LDER menggambarkan hutang jangka panjang yang dipakai semakin besar untuk investasi ke dalam ekuitas guna memperoleh penghasilan. Perusahaan dengan tingkat LDER yang lebih rendah cenderung untuk membuat dan mempublikasikan *sustainability report* karena biaya yang dibutuhkan dalam membuat laporan ini tidaklah sedikit. Perusahaan dengan tingkat hutang jangka panjang yang tinggi akan lebih memprioritaskan pada bagaimana melunasi hutang tersebut daripada membuat laporan keberlanjutan.

$$\text{Long - Term Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang jk. panjang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

(Kasmir, 2010:112).

2.1.15. *Market Capitalization*

Market Capitalization merupakan nilai pasar agregat dari surat berharga, yang ditentukan oleh harga pasar per unit surat berharga dan jumlah total surat berharga yang beredar. Para investor kelembagaan sering kali menggunakan kapitalisasi pasar sebagai salah satu kriteria investasi dengan mensyaratkan bahwa suatu perseroan harus mempunyai tingkat kapitalisasi pasar tertentu supaya masuk kualifikasi sebagai suatu investasi. Para analis melihat kapitalisasi pasar dikaitkan dengan nilai buku atau nilai akuntansi untuk mencari indikasi bagaimana investor menilai prospek masa depan suatu perseroan (Ardiyos, 2008:580).

Market Capitalization adalah nilai pasar dari saham yang diterbitkan (*outstanding share*) suatu emiten. Nilai kapitalisasi pasar diperoleh dari perkalian jumlah saham yang diterbitkan dengan nilai pasar per saham tersebut. Nilai kapitalisasi pasar suatu saham terdiri atas beberapa kelompok, yaitu: kapitalisasi besar (*big capitalization*), kapitalisasi menengah (*mid capitalization*), kapitalisasi kecil (*small capitalization*). Kapitalisasi besar (*big capitalization*) merupakan kelompok saham yang mempunyai nilai kapitalisasi pasar diatas Rp 5 Triliun. Jenis saham yang masuk dalam kelompok ini banyak diminati oleh para *fund manager* dan investor institusional besar. Sifat sahamnya cukup likuid, dan biasanya, fundamental perusahaan serta kinerja bisnisnya cukup bagus (Sapto Rahardjo, 2006:41).

Secara singkat, *market capitalization* dapat dipahami sebagai harga yang harus dibayar seseorang untuk menjadi pemilik atas seluruh saham beredar dari suatu perusahaan. Kapitalisasi pasar berbeda dengan kapitalisasi (*Capitalization*) dalam akuntansi, yang merupakan total atau jumlah ekuitas pemegang saham perusahaan ditambah dengan hutang jangka panjangnya. Perusahaan dengan tingkat kapitalisasi pasar yang lebih besar atau yang tergolong ke dalam perusahaan *big cap* akan cenderung untuk mempublikasikan *sustainability report* daripada yang kecil (*small cap*) karena adanya *sustainability report* akan memberikan nilai tambah tersendiri bagi perusahaan sehingga dengan demikian dapat meningkatkan nilai pasar saham perusahaan yang berakibat pada kenaikan nilai kapitalisasi pasar perusahaan tersebut.

Kapitalisasi Pasar = Jumlah Saham Beredar X Harga Saham

(Sapto Rahardjo, 2006:41).

2.2. Review Penelitian Terdahulu (*Theoretical Mapping*)

Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Agus Azka (2013) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pengungkapan *Sustainability Reporting* pada Perusahaan Peserta *Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA)*” dengan jumlah sampel sebanyak 67 perusahaan yang berasal dari tahun 2008-2012. Teknik pemilihan sampel adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan metode analisis data yang digunakan ialah regresi linier berganda. Hasil penelitiannya ialah bahwa secara simultan, semua variabel independen yang terdiri dari likuiditas, aktivitas dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability reporting*. Sedangkan secara parsial, likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability reporting*, sedangkan aktivitas dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability reporting*.
2. Hari Suryono Widiyanto (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage*, Aktivitas, Ukuran Perusahaan, dan *Corporate Governance* terhadap Praktik Pengungkapan *Sustainability Report*” menggunakan data sekunder pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2007-2009. Data perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan *sustainability report* dikumpulkan dengan menggunakan metode *stratified random sampling*. Metode analisis data statistik yang digunakan adalah analisis uji beda *t-test* dan regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan karakteristik-karakteristik perusahaan dan pelaksanaan *corporate governance* antara perusahaan yang melakukan pengungkapan dan tidak melakukan pengungkapan, sedangkan tidak terjadinya perbedaan yang signifikan pada variabel *leverage*. Selanjutnya, terdapat pengaruh positif yang ditimbulkan oleh variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, dewan direksi, dan komite audit. Berbeda dengan variabel yang lain seperti likuiditas, *leverage*, aktivitas, dan *governance committee* yang dijelaskan tidak memberikan pengaruh terhadap level pengungkapan *sustainability report* suatu perusahaan.

3. Khaula Luthfia (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, dan *Corporate Governance* terhadap Publikasi *Sustainability Report*.” Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2007-2010. Pemilihan sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Berdasarkan metode *purposive sampling*, jumlah sampel perusahaan yang mempublikasikan *sustainability report* (SR) adalah 24 perusahaan sedangkan jumlah perusahaan yang tidak mempublikasikan *sustainability report* (SR) adalah 19 perusahaan. Alat analisis untuk menguji hipotesis yaitu analisis regresi logistik dengan menggunakan program SPSS 17.0. Hasil penelitian ini menunjukkan total aset, jumlah karyawan, rapat dewan direksi, dan keberadaan *governance committee* berpengaruh positif terhadap publikasi SR. Adapun *leverage* menunjukkan pengaruh secara negatif terhadap publikasi SR. Sedangkan *return on asset*, *current ratio*, *inventory turnover*, struktur modal, rapat komite audit menunjukkan tidak berpengaruh terhadap publikasi SR.
4. Mega Putri Yustia Sari (2013) dalam penelitian berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan dan *Corporate Governance* terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*” menggunakan populasi berupa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009-2011. Metode pengambilan sampel dengan *purposive sampling method* yang menghasilkan 23 perusahaan yang mempublikasikan *sustainability report*. Hasil penelitiannya secara simultan yaitu bahwa semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sedangkan secara parsial, profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Komite audit dan dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sedangkan likuiditas, *leverage*, aktivitas perusahaan, ukuran perusahaan dan dewan direksi tidak menunjukkan pengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* perusahaan.
5. Puspowardhani (2013) dengan penelitian berjudul: “Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan *Corporate Governance* terhadap Publikasi *Sustainability Report*” menggunakan data sekunder pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2007-2011. Pemilihan sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Berdasarkan metode *purposive sampling*, jumlah sampel perusahaan yang mempublikasikan *sustainability report* (SR) adalah 20 perusahaan, sedangkan jumlah perusahaan yang tidak mempublikasikan *sustainability report* (SR) adalah 22 perusahaan. Alat analisis untuk menguji hipotesis yaitu analisis regresi logistik dengan menggunakan program SPSS 17.0. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa karakteristik perusahaan dan *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap publikasi *sustainability report*. Sedangkan secara parsial menunjukkan profitabilitas (*return on assets*), aktivitas, ukuran perusahaan, dan jumlah rapat komite audit berpengaruh signifikan terhadap publikasi SR. Sedangkan profitabilitas (*net profit margin*), likuiditas, *leverage*, tipe industri, jumlah rapat dewan direksi, dan *governance committee* tidak berpengaruh signifikan terhadap publikasi SR.

Adapun ringkasan penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Review Penelitian Terdahulu (*Theoretical Mapping*)

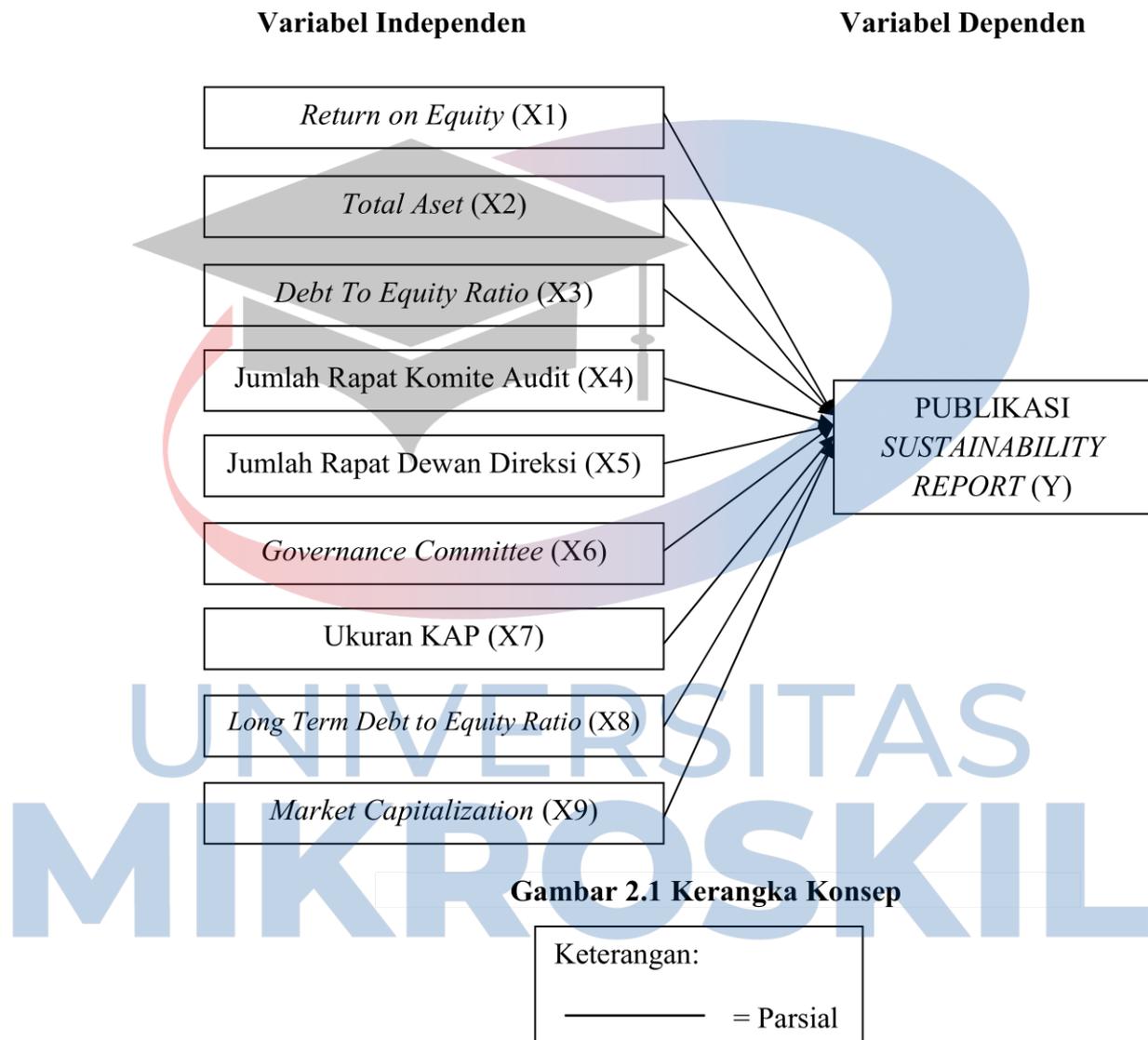
Nama Peneliti	Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Agus Azka	2013	Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Reporting</i> pada Perusahaan Peserta <i>Indonesia Sustainability Reporting Awards</i> (ISRA)	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Sustainability Report</i> <u>Variabel Independen:</u> Likuiditas, aktivitas, profitabilitas	Simultan: bahwa semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability reporting</i> . Parsial: likuiditas berpengaruh positif, sedangkan aktivitas dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability reporting</i> .

Nama Peneliti	Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Hari Suryono Widianto	2011	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , Aktivitas, Ukuran Perusahaan, dan <i>Corporate Governance</i> terhadap Praktik Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	<p><u>Variabel</u> <u>Dependen:</u> <i>Sustainability Report</i></p> <p><u>Variabel</u> <u>Independen:</u> <i>corporate governance</i>, karakteristik perusahaan, ukuran perusahaan</p>	<p>Simultan: praktik pengungkapan SR dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan, ukuran perusahaan dan CG.</p> <p>Parsial: profitabilitas, ukuran perusahaan, dewan direksi, dan komite audit berpengaruh positif terhadap praktik pengungkapan <i>sustainability report</i>. Likuiditas, <i>leverage</i>, aktivitas, dan <i>governance committee</i> tidak berpengaruh terhadap level pengungkapan <i>sustainability report</i> suatu perusahaan</p>
Khaula Luthfia	2012	Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, dan <i>Corporate Governance</i> terhadap Publikasi <i>Sustainability Report</i>	<p><u>Variabel</u> <u>Dependen:</u> <i>Sustainability Report</i></p> <p><u>Variabel</u> <u>Independen:</u> <i>Return On Asset, Current Ratio, Debt To Equity, Inventory Turnover</i>, Total Aset, Jumlah Karyawan, Struktur Modal, Rapat Dewan Direksi, Rapat Komite Audit, <i>Governance Committee</i>.</p>	<p>Simultan: semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap publikasi <i>sustainability report</i>.</p> <p>Parsial: Total aset, jumlah karyawan, rapat dewan direksi, dan keberadaan <i>governance committee</i> berpengaruh positif terhadap publikasi SR. <i>Leverage</i> menunjukkan pengaruh secara negatif terhadap publikasi SR. Sedangkan <i>return on asset, current ratio, inventory turnover</i>, struktur modal, rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap publikasi SR.</p>

Nama Peneliti	Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Mega Putri Yustia Sari	2013	Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan dan <i>Corporate Governance</i> terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	<p><u>Variabel</u> <u>Dependen:</u> <i>Sustainability Report</i></p> <p><u>Variabel</u> <u>Independen:</u> profitabilitas, likuiditas, <i>leverage</i>, aktivitas perusahaan, ukuran perusahaan, komite audit, dewan direksi dan dewan komisaris independen</p>	<p>Simultan: semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>.</p> <p>Parsial: Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>. Komite audit dan dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>. Sedangkan likuiditas, <i>leverage</i>, aktivitas perusahaan, ukuran perusahaan dan dewan direksi tidak menunjukkan pengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>.</p>
Puspo-wardhani	2013	Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan <i>Corporate Governance</i> terhadap Publikasi <i>Sustainability Report</i>	<p><u>Variabel</u> <u>Dependen:</u> <i>Sustainability Report</i></p> <p><u>Variabel</u> <u>Independen:</u> Profitabilitas (ROA), Likuiditas, <i>Leverage</i>, Tipe Industri, Aktivitas, Ukuran Perusahaan, Jumlah Rapat Komite Audit, Jumlah Rapat Dewan Direksi, <i>Governance Committee</i>.</p>	<p>Simultan: karakteristik perusahaan dan <i>corporate governance</i> tidak berpengaruh terhadap publikasi <i>sustainability report</i>.</p> <p>Parsial : ROA, aktivitas, ukuran perusahaan, dan jumlah rapat komite audit berpengaruh signifikan terhadap publikasi SR. Sedangkan <i>net profit margin</i>, likuiditas, <i>leverage</i>, tipe industri, jumlah rapat dewan direksi, dan <i>governance committee</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap publikasi SR.</p>

2.3. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang menunjukkan pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen dapat digambarkan sebagai berikut:



Dari Gambar 2.1 di atas dijelaskan bahwa secara parsial, profitabilitas (*Return on Equity*), ukuran perusahaan (total aset), *leverage* (*Debt to Equity Ratio*), jumlah rapat komite audit, jumlah rapat dewan direksi, *governance committee*, independensi auditor (ukuran KAP), struktur modal (*Long-Term Debt to Equity Ratio*), dan *market capitalization* berpengaruh terhadap publikasi *sustainability report* pada perusahaan peserta ISRA periode 2010-2014.

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Publikasi *Sustainability Report*

Profitabilitas (ROE) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap ekuitas (Hery, 2015:230). Semakin tinggi rasio ROE menunjukkan bahwa suatu perusahaan tersebut dapat menggunakan ekuitasnya secara efisien untuk memaksimalkan laba perusahaannya.

Sustainability Reporting adalah laporan yang berisi tentang kinerja perusahaan yang berkenaan dengan *triple bottom line*. Perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik identik dengan upaya-upaya untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas. Luasnya pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan adalah upaya untuk memperoleh dukungan dan mencari simpati para *stakeholder*-nya. Perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik akan meningkatkan nilai perusahaan dalam proses pembentukan *image* yang sangat berpengaruh untuk mendapat kepercayaan dari para *stakeholder*. Kinerja perusahaan yang baik, dapat dicerminkan melalui tingkat profitabilitas yang akan diperoleh dari waktu ke waktu (Widianto, 2011:57-58). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widianto (2011), Puspowardhani (2013), dan Sari (2013) menemukan bahwa ada hubungan antara Profitabilitas dengan *sustainability report*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Azka (2013) dan Luthfia (2012) tidak berhasil menemukan pengaruh profitabilitas terhadap publikasi *sustainability report*.

H1 : Profitabilititas berpengaruh terhadap publikasi *sustainability report*

2.4.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Publikasi *Sustainability Report*

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar dan pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat akan memiliki pemegang saham yang mungkin memperhatikan program sosial yang dibuat perusahaan dan laporan tahunan akan digunakan untuk menyebarkan informasi tentang tanggung jawab sosial tersebut (Agnes Sawir, 2004). Beberapa penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Widianto (2011), Puspowardhani (2013), dan Luthfia (2012)

menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *sustainability report*. Sedangkan hasil penelitian Sari (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *sustainability report*.

H2 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap publikasi *sustainability report*

2.4.3. Pengaruh *Leverage* terhadap Publikasi *Sustainability Report*

Rasio *leverage* adalah rasio untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi sering dianggap merupakan perusahaan yang kurang sehat sehingga biasanya perusahaan akan mencegah *leverage* yang tinggi dengan menekan tingkat *leverage*-nya. Perusahaan yang sudah tidak mampu lagi menekan tingkat *leverage*-nya akan memilih untuk mengurangi tingkat pengungkapan sukarela dalam laporannya dan tidak mempublikasikan *sustainability report* karena selain kesan negatif dari *leverage* yang tinggi, membuat sebuah *sustainability report* itu sendiri juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Luthfia (2012) menemukan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap publikasi *sustainability report*.

H3 : *Leverage* berpengaruh terhadap publikasi *sustainability report*

2.4.4. Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit terhadap Publikasi *Sustainability Report*

Komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan (Ikatan Komite Audit Indonesia, 2006:4).

Pertemuan komite audit merupakan wadah untuk mempertanggungjawabkan fungsi dari komite audit sendiri kepada dewan komisaris dan secara tidak langsung kepada perusahaan. Frekuensi pertemuan yang tinggi merupakan salah satu tuntutan komite audit dalam mempertanggungjawabkan

tugasnya sekaligus memberikan informasi terbaru kepada pihak-pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan. Semakin intensnya komite audit melakukan rapat, semakin banyak hal yang dievaluasi, salah satunya adalah ketaatan perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan sehubungan dengan aktivitas bisnis yang dilakukan dan dilaporkan dalam bentuk *sustainability report* (Ilyona Risty dan Sany, 2015:7-8)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widiyanto (2011), Puspowardhani (2013), dan Sari (2013) menemukan bahwa ada pengaruh jumlah rapat komite audit terhadap publikasi *sustainability report*. Sedangkan hasil dari penelitian Luthfia (2012) menyatakan bahwa jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap publikasi *sustainability report*.

H4 : Jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap publikasi *sustainability report*

2.4.5. Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Direksi terhadap Publikasi *Sustainability Report*

Dewan direksi merupakan seseorang yang ditunjuk untuk memimpin Peseroan Terbatas (PT), dapat berasal dari seseorang yang memiliki perusahaan tersebut ataupun orang profesional yang ditunjuk oleh pemilik usaha. Dewan direksi bertindak sebagai aspek sistem pengendalian dalam suatu perusahaan, memiliki peran ganda yaitu sebagai *monitoring* dan pengambil keputusan. Berdasarkan *code of corporate governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) dewan direksi memiliki tugas untuk merencanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Bukti realisasi perencanaan tersebut dapat dipublikasikan melalui SR dikarenakan isi yang terdapat dalam SR cenderung identik dengan tanggung jawab sosial yang dimuat dalam *annual report* (Khaula Luthfia, 2012:23).

Hasil penelitian dari Luthfia (2012) dan Widiyanto (2011) menyatakan bahwa jumlah rapat dewan direksi mempengaruhi *sustainability report*, sedangkan penelitian dari Puspowardhani (2013) dan Sari (2013) menyatakan bahwa jumlah rapat dewan direksi tidak mempengaruhi *sustainability report*

H5 : Jumlah rapat dewan direksi berpengaruh terhadap publikasi *sustainability report*

2.4.6. Pengaruh Governance Committee terhadap Publikasi *Sustainability Report*

Komite Kebijakan *Corporate Governance* merupakan komite yang bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun oleh direksi serta menilai konsistensi penerapannya, termasuk yang bertalian dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*); Anggota Komite Kebijakan *Corporate Governance* terdiri dari anggota dewan komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan; Bila dipandang perlu, Komite Kebijakan *Corporate Governance* dapat digabung dengan Komite Nominasi dan Remunerasi. (KNKG, 2006:23).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Luthfia (2012) menemukan bahwa ada hubungan antara keberadaan *governance committee* terhadap publikasi *sustainability report*. Akan tetapi, hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspowardhani (2013) menyatakan hal sebaliknya, yaitu bahwa keberadaan *governance committee* tidak berpengaruh terhadap publikasi *sustainability report*.

Berdasarkan *code of corporate governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) *governance committee* memiliki tugas mengkaji pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) terutama berkaitan dengan etika bisnis dan tanggung jawab. Oleh karena itu keberadaan *governance committee* memiliki pengaruh terhadap publikasi SR dikarenakan komite ini dapat merekomendasikan perusahaan untuk mempublikasikan SR dalam rangka mengatur komunikasi dengan *stakeholder* dan sebagai bukti perusahaan telah melaksanakan tanggung jawab perusahaan (Khaula Luthfia, 2012:23).

H6 : *Governance Committee* berpengaruh terhadap publikasi *sustainability report*

2.4.7. Pengaruh Independensi Auditor terhadap Publikasi *Sustainability Report*

Independensi merupakan dasar dari profesi auditing. Hal itu berarti bahwa auditor akan bersifat netral kepada entitas, dan oleh karena itu akan bersikap objektif.

Publik dapat mempercayai fungsi audit karena auditor bersikap tidak memihak serta mengakui adanya kewajiban untuk bersikap adil (Boynton *et al.*, 2003:66). Tingkat independensi suatu auditor dipengaruhi oleh ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) tempat auditor bekerja. Ukuran KAP dapat dikatakan besar jika KAP tersebut berafiliasi dengan *Big Four*, mempunyai cabang dan kliennya perusahaan-perusahaan besar serta mempunyai tenaga profesional di atas 25 orang. Sedangkan ukuran KAP dikatakan kecil jika tidak berafiliasi dengan *Big Four*, tidak mempunyai kantor cabang dan kliennya perusahaan kecil serta jumlah profesionalnya kurang dari 25 orang (Arens *et al.*, 2008:33). KAP *Big Four* dianggap memiliki kualitas yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan KAP *non Big Four*. KAP *Big Four* umumnya dianggap sebagai penyedia laporan keuangan dengan kualitas audit yang lebih tinggi dan memiliki reputasi yang tinggi dalam lingkungan bisnis, sehingga akan berusaha untuk mempertahankan independensi mereka untuk menjaga nama baik. Investor cenderung lebih percaya terhadap laporan keuangan yang diaudit oleh auditor yang bereputasi. Perusahaan yang menggunakan jasa KAP *Big Four* yang dianggap lebih berkualitas cenderung untuk mempublikasikan *sustainability report* karena publik dapat mempercayai laporan yang dipublikasikan oleh perusahaan tersebut.

H7 : Independensi Auditor berpengaruh terhadap publikasi *sustainability report*

2.4.8. Pengaruh Struktur Modal terhadap Publikasi *Sustainability Report*

Struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari hutang jangka panjang (*long-term liabilities*) dan modal sendiri (*shareholders' equity*) yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan. Struktur modal diprosikan dengan *Long Term Debt to Equity Ratio*, yang merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan (Kasmir, 2010:112). Semakin tinggi tingkat rasio LDER menggambarkan hutang jangka panjang yang dipakai semakin besar untuk investasi ke dalam ekuitas guna memperoleh penghasilan. Perusahaan dengan tingkat LDER

yang lebih rendah cenderung untuk membuat dan mempublikasikan *sustainability report* karena biaya yang dibutuhkan dalam membuat laporan ini tidaklah sedikit. Perusahaan dengan tingkat hutang jangka panjang yang tinggi akan lebih memprioritaskan pada bagaimana melunasi hutang tersebut daripada membuat laporan keberlanjutan.

H8 : Struktur Modal berpengaruh terhadap publikasi *sustainability report*

2.4.9. Pengaruh Market Capitalization terhadap Publikasi *Sustainability Report*

Market Capitalization adalah nilai pasar dari saham yang diterbitkan (*outstanding share*) suatu emiten. Nilai kapitalisasi pasar diperoleh dari perkalian jumlah saham yang diterbitkan dengan nilai pasar per saham tersebut (Sapto Rahardjo, 2006:41). Para investor kelembagaan seringkali menggunakan kapitalisasi pasar sebagai salah satu kriteria investasi dengan mensyaratkan bahwa suatu perseroan harus mempunyai tingkat kapitalisasi pasar tertentu supaya masuk kualifikasi sebagai suatu investasi. Para analis melihat kapitalisasi pasar dikaitkan dengan nilai buku atau nilai akuntansi untuk mencari indikasi bagaimana investor menilai prospek masa depan suatu perseroan (Ardiyos, 2008:580).

Perusahaan dengan nilai kapitalisasi pasar yang lebih besar (*big cap*), akan lebih ditargetkan sebagai pilihan untuk berinvestasi oleh para investor sehingga perusahaan dengan nilai kapitalisasi pasar yang besar akan cenderung untuk menerbitkan dan mempublikasikan *sustainability report* karena lewat publikasi dari informasi yang bersifat sukarela ini dapat memberi nilai tambah bagi suatu perusahaan sehingga lebih menarik perhatian investor.

H9 : *Market capitalization* berpengaruh terhadap publikasi *sustainability report*